



KEPALA DESA PUNTUKREJO
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PUNTUKREJO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) "KRIDHA JAYA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUNTUKREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Puntukrejo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Kridha Jaya";
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Puntukrejo tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Kridha Jaya".

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa

- Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
 7. Peraturan Desa Puntukrejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Puntukrejo Tahun 2018 Nomor 5);
 8. Peraturan Desa Puntukrejo Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Puntukrejo (Lembaran Desa Puntukrejo Tahun 2018 Nomor 2);
 9. Peraturan Desa Puntukrejo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Puntukrejo Tahun 2019 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNTUKREJO
dan
KEPALA DESA PUNTUKREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNTUKREJO TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) "KRIDHA JAYA"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Puntukrejo yang berkedudukan di kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
11. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Kridha Jaya” yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Puntukrejo guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
13. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
14. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah ketentuan

pokok dan ketentuan operasional organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang BUM Desa.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Puntukrejo mendirikan BUM Desa “Kridha Jaya”.

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “Kridha Jaya” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

(1) Peraturan Desa Puntukrejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Puntukrejo berikut Anggaran

Dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa yang masih berjalan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Puntukrejo.

Ditetapkan di Puntukrejo
pada tanggal 30 Desember 2022


KEPALA DESA PUNTUKREJO,
SUPARNO

Diundangkan di Puntukrejo
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DESA PUNTUKREJO,
EKO JOKO SUSILO

LEMBARAN DESA PUNTUKREJO TAHUN 2022 NOMOR 11